

TESIS

**PERCERAIAN DAN REKONSILIASI MENURUT HUKUM KANONIK
GEREJA KATOLIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



OLEH:

YOHANES KRISTIAN PRANATA / 032014253030

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERCERAIAN DAN REKONSILIASI MENURUT HUKUM KANONIK
GEREJA KATOLIK DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

YOHANES KRISTIAN PRANATA, S.H.

NIM: 032014253030

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 18 Januari 2022**

Oleh

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP: 196504191990021001

Dosen Pembimbing II



Erni Agustin, S.H., LL.M.

NIP: 198308102006042001

Mengetahui

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, Pada
tanggal 12 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
4. Erni Agustin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Perceraian Dan Rekonsiliasi Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Perkawinan dalam agama Katolik memiliki ciri-ciri hakiki yaitu monogami dan tak tercerai. Pada faktanya tidak sedikit umat Katolik di Indonesia yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai apakah hukum agama masuk dalam *ratio decidendi* majelis hakim ketika memberikan putusan mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Selanjutnya, ada beberapa pasutri Katolik yang telah bercerai ingin melakukan rekonsiliasi atau kembali menjalin rumah tangga dengan mantan pasangan yang telah diceraikannya. Hal ini juga menimbulkan suatu pertanyaan mengenai apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pasutri tersebut untuk dapat kembali berstatus sebagai suami istri yang sah di mata Negara dan Gereja Katolik. Berdasarkan permasalahan tersebut, diambil dua isu hukum yaitu: (1) *Ratio decidendi* dari putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik dan akibat hukum yang ditimbulkan, (2) Rekonsiliasi bagi pasutri Katolik yang telah bercerai melalui Pengadilan Negeri.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Hukum Agama tidak dimasukkan dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri ketika memberikan putusan mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasutri yang beragama Katolik. Akibat hukumnya adalah hubungan perkawinan antara pasutri Katolik menjadi putus di mata Negara namun tidak di mata Gereja Katolik. Untuk dapat kembali menjadi suami istri yang sah, pasutri yang bersangkutan dapat melakukan sakramen tobat dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Saran yang dapat diberikan melalui proposal tesis ini ada 2, yaitu Negara perlu membentuk suatu aturan yang mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek hukum agama ketika mengadili suatu sengketa perceraian dan Gereja Katolik perlu memberikan pemahaman pada umatnya terkait adanya larangan perceraian dalam agama Katolik.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Rekonsiliasi, Hukum Kanonik

ABSTRACT

The title of this research is "Divorce and Reconciliation According to Canon Law of the Catholic Church and Marriage Law in Indonesia". This research is a normative legal research that uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Marriage in the Catholic religion has essential characteristics, namely monogamy and indissolubility. In fact, not a few Catholics in Indonesia have divorced in the District Court. This raises a question about whether religious law is included in the ratio decidendi of the panel of judges when giving a decision regarding divorce by a Catholic couple and what are the legal consequences of the divorce. Furthermore, there are some divorced Catholic couples who want to reconcile or re-establish a household with their ex-partners who have been divorced. This also raises a question about what actions the couple needs to take to regain their status as legal husband and wife in the eyes of the State and the Catholic Church. Based on these problems, two legal issues were taken, namely: (1) the ratio decidendi of the District Court's decision on divorce by Catholic couples and the legal consequences, (2) Reconciliation for divorced Catholic couples through the District Court.

The conclusion that can be drawn from this research is that religious law is not included in the ratio decidendi of the District Court Judges when giving a decision regarding divorce by a Catholic couple. The legal consequence is that the marital relationship between Catholic couples is broken in the eyes of the State but not in the eyes of the Catholic Church. To be able to return to being a legal husband and wife, the couple concerned can perform the sacrament of repentance and apply for an annulment of the marriage. There are 2 suggestions that can be given through this thesis proposal, namely the State needs to form a rule that requires the Panel of Judges to consider aspects of religious law when adjudicating a divorce dispute and the Catholic Church needs to provide understanding to its people regarding the prohibition of divorce in the Catholic religion.

Keywords: *Marriage, Divorce, Reconciliation, Canon Law.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

❖ Nama : Yohanes Kristian Pranata
❖ N I M : 032014253030
❖ Alamat/No. Tlp. : Bratang Ged. no. 7 / 082231677023

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 24 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



NIM. 032014253030

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah Tritunggal Mahakudus yang telah mencurahkan segala rahmat yang saya butuhkan untuk dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perceraian Dan Rekonsiliasi Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” dengan baik dan tepat waktu. Saya menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku koordinator dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku tim pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis;
6. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis;
7. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku tim pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;
9. Orang tua yang telah memberikan dukungan finansial, moral, dan spiritual kepada saya selama pengerjaan Tesis ini;

10. Nathania Jasmine Benhady yang telah secara pro aktif membantu dan mendukung saya selama proses pengerjaan Tesis ini dari awal hingga akhir;
11. Natasha Citra Kurniawan dan Denita Cahyanti Wahono yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
12. Carrisa Shannon Lie yang telah menemani dan berjuang bersama saya sejak S1 hingga S2;
13. Semua orang yang telah membantu dan mendoakan saya kepada Allah sehingga Allah memampukan saya untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penyusun

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Al-Kitab Deuterokanonika;

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*);

Katekismus Gereja Katolik.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rtg;

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Sim;

Putusan Nomor 145/Pdt.P/2021/PN Jkt.Tim.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan... ..	ii
Abstrak... ..	iv
Abstract	v
Lembar Orisinalitas... ..	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Peraturan Perundang-Undangan... ..	ix
Daftar Putusan Pengadilan	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian	6
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Manfaat Teoritis	7
1.3.2. Manfaat Praktis... ..	7
1.4. Metode Penelitian.....	7

1.4.1. Tipe Penelitian...	7
1.4.2. Pendekatan Masalah...	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum...	9
1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.4.5. Analisis Bahan Hukum...	12
1.5. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PASUTRI KATOLIK DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN.....	15
2.1. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Gereja Katolik...	15
2.2. Analisis Putusan PengadilanNegeri Tentang Perceraian yang Dilakukan Oleh Pasutri Katolik...	31
2.2.1. Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PN Sim.....	32
2.2.2. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rtg	37
2.2.3. Penerapan Teori Sistem Hukum Berbasis Agama Pada Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PN Sim dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rtg.....	44

2.3. Akibat Hukum Dari Perceraian Yang Dilakukan Pasutri Katolik Melalui Pengadilan Negeri.....	54
--	----

BAB III REKONSILIASI BAGI PASUTRI KATOLIK YANG TELAH

BERCERAI MELALUI PENGADILAN NEGERI.....	58
--	-----------

3.1. Sakramen Tobat Sebagai Dasar Rekonsiliasi Bagi Pasutri Katolik yang Telah Bercerai Menurut Agama Katolik	58
--	----

3.2. Upaya Hukum Rekonsiliasi Pasutri dan Kekuatan Mengikatnya.....	62
--	----

3.2.1. Pisah Ranjang Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Problematika Dalam Kehidupan Perkawinan	63
--	----

3.2.2. Pembatalan Perceraian Bagi Mantan Pasutri Katolik yang Ingin Melakukan Rekonsiliasi	68
---	----

3.3. Akibat Hukum Rekonsiliasi Bagi Pasutri dan Harta Benda Perkawinan.....	86
--	----

BAB IV PENUTUP	91
-----------------------------	-----------

4.1. Kesimpulan... ..	91
-----------------------	----

4.2. Saran.....	92
-----------------	----

DAFTAR BACAAN